

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan munculnya era baru Pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan tumbangannya rezim pemerintahan Orde Baru dan digantikan dengan Orde Reformasi, maka tuntutan akan perubahan disegala bidang semakin mendesak. Salah satu tuntutan tersebut adalah adanya perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya adalah terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia termasuk didalamnya adalah Aspek Pendidikan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang nomor 32 tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi; (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Hukum, (5) Moneter dan Fiskal, dan (6) Agama. Selain urusan-urusan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada Pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten atau kota.

Dikatakan oleh Rasyid (2005:8-9), bahwa tujuan utama dari kebijakan desentraliasi adalah disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-

beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami merespon berbagai kecenderungan global dalam mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Dikatakan bahwa desentralisasi merupakan simbol "*trust*" dari pemerintah pusat kepada sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah, dalam sistem otonomi mereka di tantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Surbakti (2000: 8-9) kewenangan otonomi di berikan kepada daerah ialah untuk memelihara dan mengembangkan identitas budaya lokal. Tanpa otonomi yang luas, daerah-daerah akan kehilangan identitas budaya lokal baik berupa adat istiadat maupun agama, seperti Bali, Sumatera Barat, Riau, Aceh, Papua, dan Sumatra Utara,

Akan tetapi, pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak januari tahun 2000 tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan. Bahwa tidak dapat dipungkiri desentralisasi telah banyak memberikan manfaat bagi daerah terutama adanya kemandirian dari daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, menentukan strategi pengembangan daerah,

serta dalam menentukan masa depan masyarakat di daerah; tetapi pada satu sisi, fenomena etnosentrisme tidak dapat dipungkiri telah mengemuka dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai konflik yang bernuansa SARA (kasus Ambon, Poso, Ketapang), pengistimewaan "putra daerah", dan marginalisasi etnis "pendatang". Dalam pengamatan Azra (2001: 4), otonomi cenderung mengakibatkan terjadinya kemerosotan integritas nasional. Otonomi cenderung mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen "putra daerah" dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal.

Dari beberapa fenomena di atas, baik menyangkut kerusuhan yang bernuansa SARA, pengistimewaan "putra daerah", serta marginalisasi etnis "pendatang", memberikan gambaran akan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Oleh karena itu, demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan, maka dibutuhkan manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Untuk dapat menciptakan manusia yang berkualitas seperti yang diharapkan di atas, maka diperlukan system pendidikan yang komprehensif. Sistem pendidikan yang komprehensif yang dimaksud adalah system

pendidikan yang tidak hanya berorientasi kepada pemberian seperangkat ilmu (*transfer of knowledge*) atau mata pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga menyangkut pemberian pola sikap dan seperangkat ketrampilan sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat. Sistem pendidikan yang seimbang antara aspek afeksi, kognisi, dan psikomotorik, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, serta seimbang antara kebutuhan duniawi dan harapan ukhrawi.

Untuk dapat merelisasikan harapan-harapan tersebut, pembaharuan pembaharuan dalam pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Pembaharuan tersebut ada yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan, Paradigma manajemen, pengelolaan sumber-sumber, paradigma pengembangan kurikulum, pengelolaan keuangan, serta mekanisme evaluasi. Pembaharuan pendidikan yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan misalnya, dapat dilihat dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi pemerintahan dimana salah satu bidang yang ikut di desentralisasikan adalah bidang pendidikan.

Pembaharuan dalam system pengelolaan pendidikan dapat dilihat dengan adanya konsep *School Based Management* (MBS), yaitu model pengelolaan pendidikan yang lebih memberikan kemandirian kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengelola dan mengurus sekolahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Menurut Malen (1990) sebagaimana dalam Hasbullah (2006 :72), tujuan MBS adalah meningkatkan semua kinerja sekolah yaitu menyangkut efektifitas,

kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan. Pembaharuan dalam pengelolaan sumber-sumber belajar dapat dilihat dengan adanya keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan lingkungan sebagai faktor pendukung pembelajaran, serta adanya ruang bagi pendidik atau guru untuk menciptakan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi lingkungan demi mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembaharuan dalam pengembangan kurikulum dapat dilihat dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yaitu kurikulum dengan paradigma baru pengembangannya yang memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum yang di terapkan di setiap sekolah dapat lebih bermakna, sesuai dengan keadaan sekolah, serta dapat menciptakan penyeimbangan materi ajar antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal (melalui kurikulum muatan lokal). Sedangkan pembaharuan dalam evaluasi dapat dilihat dengan diberlakukannya system ujian nasional (UN) yang semula menggunakan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) dan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS).

Salah satu bentuk atau wujud pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. Undang Undang ini diberlakukan dengan satu pertimbangan bahwa system pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Undang Undang Sisdiknas ini kemudian dijabarkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan (Bab II, pasal 2). Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis satuan pendidikan tertentu. Sedangkan Standar kompetensi lulusan (SKL) meliputi standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, yang akan bermuara pada kompetensi dasar (KD).

Standar isi (SI) sebagaimana dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2003 memuat kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kerangka dasar kurikulum meliputi ; 1) kelompok mata pelajaran agama dan

akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; dan 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. Sedangkan dalam struktur kurikulum memuat tentang pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari ; (a) mata pelajaran, (b) muatan lokal, dan (c) Pengembangan diri. Mata pelajaran, terdiri dari beberapa bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik sebagai persiapan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi; Muatan lokal adalah materi yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan berdasar pada potensi dan kebutuhan daerah, sekaligus untuk menciptakan keseimbangan materi ajar antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal atau daerah. Hal ini sejalan dijadikannya muatan lokal sebagai strategi pokok operasionalisasi *'link and match'* dalam pendidikan. Dikatakan bahwa *"memaksimalkan muatan lokal untuk kemampuan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program"* (Depdikbud, 1993: 14).

Kabijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi oleh kenyataan bahwa indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau serta beraneka ragam kebudayaan. Sekolah tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan disekolah perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kekhususan yang ada dilingkungan



sekitarnya. Standar isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat memuat muatan lokal tersebut, apakah lagi bahwa potensi serta kebutuhan setiap daerah sangat beragam.

Secara umum, tujuan penerapan muatan lokal adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional (Depdiknas: 2006).

Lebih lanjut dikatakan, bahwa secara khusus penerapan muatan lokal bertujuan agar peserta didik :

1. mengenal dan menjadi akrab dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budayanya.
2. memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
4. menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.

Memahami konsep dasar dan tujuan penerapan kurikulum muatan lokal tersebut diatas, memberikan sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya tujuan utama penerapan kurikulum muatan lokal adalah untuk menjembatani adanya kesenjangan antara peserta didik dengan lingkungannya.

Menurut Mulyasa (2006: 273), Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Penentuan isi dan materi atau bahan pelajaran muatan lokal didasarkan pada keadaan, potensi dan kebutuhan daerah atau lingkungan, yang dituangkan dalam mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri. Adapun materi dan isinya ditentukan oleh satuan pendidikan, yang dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan keadaan, potensi dan kebutuhan daerah. Sedangkan menurut Idi (2007: 260), Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial serta lingkungan budaya dan kebutuhan daerah, sedangkan anak didik didaerah itu wajib mempelajarinya. Lingkungan alam adalah lingkungan alamiah yang ada disekitar kehidupan kita, berupa benda-benda mati yang terbagi dalam empat kelompok lingkungan, yaitu : (1) Pantai, (2) dataran rendah termasuk didalamnya daerah aliran sungai, (3) dataran tinggi, dan (4) pegunungan.

Dengan demikian, karena tujuan utama dari penerapan muatan lokal adalah bagaimana mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan, budaya serta potensi daerah dimana sekolah diselenggarakan, maka ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam implementasi muatan lokal adalah ; (1) muatan lokal harus disesuaikan dengan keadaan daerah, (2) muatan lokal



harus berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah, dan (3) muatan lokal harus sejalan dengan kebutuhan daerah atau masyarakat.

Memahami tujuan penerapan kurikulum muatan lokal tersebut, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi disekolah; *pertama*, kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan berdasarkan potensi daerah dan berdasarkan kebutuhan daerah; *kedua*, kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan tidak berdasarkan potensi daerah tetapi di butuhkan oleh daerah; *ketiga*, kurikulum muatan lokal yang di implementasikan berdasarkan potensi daerah tetapi tidak dibutuhkan oleh daerah; dan *keempat*, kurikulum muatan lokal yang di implementasikan tidak berdasarkan potensi daerah dan tidak berdasarkan kebutuhan daerah.

Selanjutnya, dikatakan oleh Chan dan Sam (2005:196-197), bahwa muatan lokal yang berlandaskan kekuatan dan kebutuhan daerah serta mendukung pembangunan nasional dan berwawasan global, dapat mengantarkan anak yang mampu bersaing dalam kehidupan global. Kurikulum ke depan harus dikembangkan dengan memegang empat pilar pendidikan sebagaimana kesepakatan Dakar. Pilar-pilar tersebut adalah (1) belajar untuk mengetahui yakni belajar untuk mendapatkan instrumen atau pemahaman; (2) belajar untuk berbuat sehingga mampu bertindak kreatif di lingkungannya; (3) belajar untuk bersama sehingga mampu berperan serta dan bekerja sama dengan orang-orang lain di dalam kegiatan manusia; dan (4) belajar untuk menjadi seseorang, sesuatu kemajuan penting yang merupakan kelanjutan dari ketiga hal di atas.

Meskipun demikian, tujuan penerapan kurikulum muatan lokal belum berjalan sesuai dengan harapan. Begitu banyak kendala yang ditemui dalam proses implementasi muatan lokal, diantaranya adalah; keterbatasan pemahaman guru mengenai muatan lokal; tidak adanya tim pengembang kurikulum muatan lokal di daerah atau di sekolah; adanya pemahaman bahwa muatan lokal adalah bahasa daerah sehingga yang diajarkan di setiap sekolah adalah bahasa daerah; tidak di manfaatkannya lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar dalam penerapan muatan lokal; serta tidak jelasnya format evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi muatan lokal. Akhirnya, sampai saat ini efek atau manfaat dari implementasi kurikulum muatan lokal belum begitu terasa baik pada *internal* sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Harapan yang untuk mengakrapkan siswa dengan lingkungannya, bersikap sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, serta memberikan seperangkat ketrampilan sebagai bekal hidup bagi peserta didik masih jauh dari harapan.

Kabupaten Wakatobi sebagai daerah pemerintahan yang baru melalui Undang Undang No. 29 Tahun 2003 (pemekaran dari Kabupaten Buton) dengan persentase wilayah 94% wilayah lautan dan 6% wilayah daratan menjadikan area laut sebagai sektor andalan untuk menunjang perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal dilandasi oleh sebuah realitas bahwa potensi laut pada kabupaten wakatobi sangat melimpah. Potensi tersebut meliputi: 1) Perikanan tangkap, 2) perikanan budi daya, 3) pariwisata bahari, 4) hutan mangrove, 5) perhubungan laut, 6) sumber

daya wilayah pulau-pulau kecil, dan 7) sumber daya alam nonkonvensional. Salah satu potensi tak ternilai yang dapat dijumpai pada daerah kabupaten wakatobi adalah potensi wisata bawah laut (pariwisata bahari) yang menawarkan beribu-ribu macam biota laut serta keindahan panorama terumbu karang. Data dari WTO (2000) sebagaimana dikemukakan oleh Dahuri, R. (Sindo: 2007, 17 Desember), bahwa dari sepuluh ekosistem terumbu karang terindah di dunia, enam di antaranya berada di Indonesia, yaitu Raja Ampat, *Wakatobi*, Taka Bone Rate, Bunaken, Karimun Jawa, dan pulau Weh. Namun demikian, potensi daerah kabupaten Wakatobi tidak hanya ada pada sektor kelautan, tetapi juga ada pada sektor-sektor lain, seperti pertanian, pariwisata dan budaya, serta pada sektor kerajinan.

Untuk dapat memperkenalkan kepada seluruh masyarakat akan adanya potensi daerah tersebut maka perlu adanya langkah sosialisasi. Dengan langkah sosialisasi ini diharapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan hidupnya serta bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Salah satu langkah yang strategis untuk memperkenalkan potensi daerah tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan adalah dengan melalui implementasi kurikulum muatan lokal. Dengan implementasi kurikulum muatan lokal, peserta didik diharapkan dapat menjadi akrab dengan lingkungannya, serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di daerahnya.

Akan tetapi, yang terjadi di kabupaten wakatobi adalah adanya kecenderungan untuk menyelenggarakan muatan lokal kelautan pada semua jenjang pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Kecenderungan ini didasari oleh adanya pemikiran bahwa penyelenggaraan muatan lokal kelautan sangat tepat karena merupakan karakteristik daerah serta potensi andalan daerah. Keadaan ini tentu membuka kemungkinan tidak akan tercapainya tujuan penerapan kurikulum muatan lokal, mengingat bahwa potensi daerah sangat beragam, serta kebutuhan masyarakat pada setiap kecamatan dan kebutuhan siswa setiap sekolah mempunyai perbedaan.

Oleh karena itu, penelitian untuk melihat adanya relevansi antara potensi daerah serta kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal di kabupaten wakatobi merupakan sebuah keniscayaan. Dengan penelitian ini, diharapkan akan ditemukan titik relevansi atau adanya kesesuaian antara potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan pada sekolah menengah di kabupaten wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Relevansi kurikulum muatan lokal di dasarkan pada empat komponen kurikulum, yaitu tujuan (*aims, goals, and objectives*), materi/isi (*content*), proses (*learning activities*), dan evaluasi (*evaluation*). Keempat komponen ini saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berkisar pada relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal. Penelitian ini akan berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan relevansi pendidikan, khususnya relevansi antara potensi yang dimiliki oleh daerah, serta kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkapkan implementasi muatan lokal pada setiap sekolah menengah yang menyangkut tujuan, materi atau isi muatan lokal, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi, serta mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh daerah yang dapat dijadikan sebagai materi atau isi kurikulum muatan lokal. Potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut menyangkut potensi lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Hal ini dilakukan dengan dasar untuk menilai relevansi potensi yang dimiliki oleh daerah serta kebutuhan daerah dengan muatan lokal.

Dengan demikian, maka penelitian ini tidak hanya untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang "bagaimanakah " implementasi muatan lokal baik menyangkut tujuan, materi (*content*), kegiatan (*learning activities*), maupun pelaksanaan evaluasi pada sekolah menengah di Kabupaten Wakatobi. Tetapi juga harus dapat mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang "bagaimana relevansi potensi daerah dengan tujuan, materi, proses, maupun evaluasi kurikulum muatan lokal", bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan tujuan, materi, proses, dan evaluasi kurikulum muatan lokal,

serta bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal pada sekolah menengah di kabupaten wakatobi.

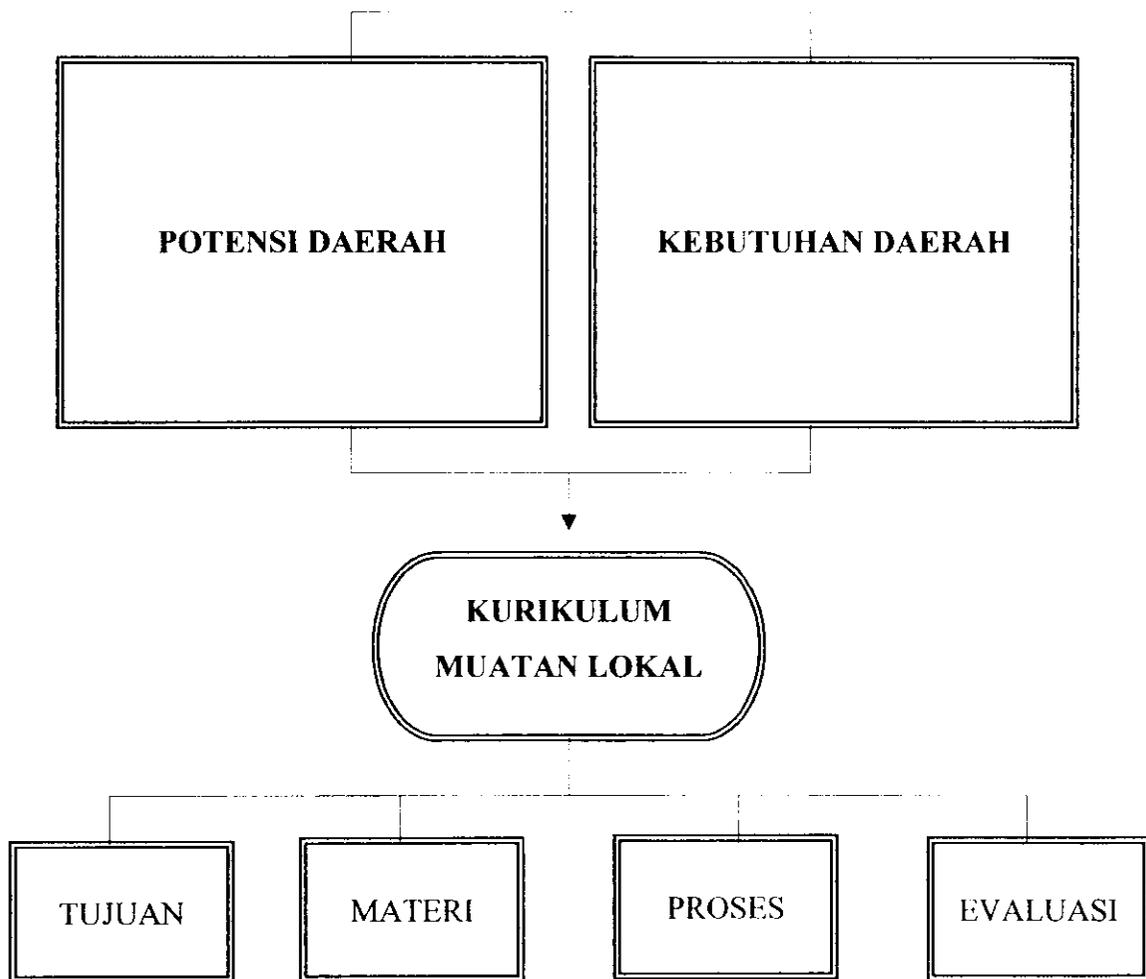
Kurikulum muatan lokal tersebut terdiri dari empat mata pelajaran, yaitu ; (1) muatan lokal kelautan, yang diselenggarakan pada SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, (2) muatan lokal pertanian, yang diselenggarakan pada SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, (3) muatan lokal baca tulis Qur'an (BTQ) yang diselenggarakan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) wangi-wangi, dan (4) muatan lokal kelautan dan perkebunan yang diselenggarakan pada SMA Negeri 1 Kecamatan Tomia

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi potensi daerah dengan kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan pada sekolah menengah (SMA/MA) di Kabupaten Wakatobi?
  - a) Bagaimana relevansi potensi daerah dengan tujuan muatan lokal?
  - b) Bagaimana relevansi potensi daerah dengan materi/isi muatan lokal?
  - c) Bagaimana relevansi potensi daerah dengan proses atau aktifitas pembelajaran muatan lokal?
  - d) Bagaimana relevansi potensi daerah dengan evaluasi muatan lokal?
2. Bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan pada sekolah menengah (SMA/MA) di Kabupaten Wakatobi?
  - a) Bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal?

- b) Bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan materi/isi muatan lokal?
  - c) Bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan proses atau aktifitas pembelajaran muatan lokal?
  - d) Bagaimana relevansi kebutuhan daerah dengan evaluasi muatan lokal?
3. Bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal yang di selenggarakan pada sekolah menengah di Kabupaten Wakatobi?
- a) Bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal?
  - b) Bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan materi/isi muatan lokal?
  - c) Bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan proses atau aktifitas pembelajaran muatan lokal?
  - d) Bagaimana relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal?

Dengan demikian, paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1.1  
Paradigma Penelitian

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan pada sekolah menengah di kabupaten Wakatobi. Muatan lokal yang diselenggarakan pada sekolah menengah terdiri dari; muatan lokal kelautan, muatan lokal pertanian, muatan lokal baca tulis qur'an, serta muatan

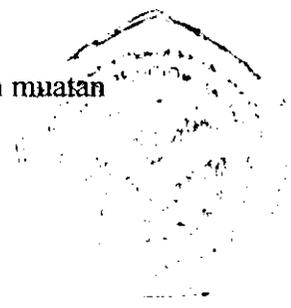
lokal kelautan dan perkebunan. Relevansi potensi dan kebutuhan daerah dapat dilihat dari adanya keterkaitan dan kesesuaian dengan komponen-komponen muatan lokal baik menyangkut komponen tujuan, materi (*content*), proses, maupun evaluasi.

## **2. Tujuan Khusus**

Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui relevansi potensi daerah dengan tujuan muatan lokal.
2. Mengetahui relevansi potensi daerah dengan materi/isi muatan lokal.
3. Mengetahui relevansi potensi daerah dengan aktifitas pembelajaran muatan lokal.
4. Mengetahui relevansi potensi daerah dengan evaluasi muatan lokal.
5. Mengetahui relevansi kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal.
6. Mengetahui relevansi kebutuhan daerah dengan materi muatan lokal.
7. Mengetahui relevansi kebutuhan daerah dengan aktifitas pembelajaran muatan lokal.
8. Mengetahui relevansi kebutuhan daerah dengan evaluasi muatan lokal.
9. Mengetahui relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal.
10. Mengetahui relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan materi muatan lokal.
11. Mengetahui relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan aktifitas pembelajaran muatan lokal?

12. Mengetahui relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan tujuan muatan lokal?



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini difokuskan pada masalah relevansi pendidikan, khususnya relevansi potensi dan kebutuhan daerah dengan kurikulum muatan lokal. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola pendidikan mengenai pentingnya pemanfaatan potensi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan relevansi pendidikan khususnya pada penyelenggaraan kurikulum muatan lokal.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

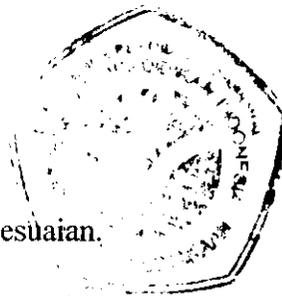
- a) Bagi Guru mata pelajaran muatan lokal, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam implementasi kurikulum muatan lokal sehingga dapat lebih relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah dimana pendidikan dan pengajaran diselenggarakan.
- b) Bagi Para Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan

kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten Wakatobi.

- c) Bagi Supervisor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan supervisi dalam menyempurnakan dan meningkatkan relevansi muatan lokal.
- d) Bagi Masyarakat, Komite sekolah/madrasah dan Dunia Kerja, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan program serta dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan khususnya muatan lokal agar dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- e) Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi dapat menentukan alternatif terbaik dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal. Artinya, bahan kajian muatan lokal yang akan di implementasikan tidak harus masalah kelautan, tetapi yang paling penting adalah muatan lokal tersebut sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.
- f) Bagi Kantor Departemen Agama Kabupaten Wakatobi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan program, maupun penyelenggaraan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik madrasah serta kebutuhan masyarakat pada sektor keagamaan di Kabupaten Wakatobi.

## E. Definisi Istilah

- a. Relevansi bermakna adanya keterkaitan, hubungan, atau kesesuaian. Relevansi dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan, hubungan, atau kesesuaian antara potensi yang dimiliki oleh daerah serta hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah dengan muatan lokal yang diajarkan pada setiap sekolah menengah di Kabupaten Wakatobi dengan. Relevansi kurikulum muatan lokal berkenaan dengan tujuan, materi (*content*), proses dan evaluasi.
- b. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di Kabupaten Wakatobi yang dilindungi, dikembangkan, dan dijadikan bahan ajar pada sekolah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta kekayaan alam. Adapun potensi daerah kabupaten Wakatobi yang menjadi sektor andalan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah; potensi kelautan dan perikanan, potensi pertanian dan perkebunan, potensi kerajinan, dan potensi pariwisata. Salah satu potensi daerah yang saat ini sedang diperkenalkan, dikembangkan, dan diupayakan pelestariannya melalui sekolah adalah masalah kelautan.
- c. Kebutuhan Daerah dimaknai sebagai segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat disuatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat sesuai dengan arah perkembangan serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk; (a) Melestarikan dan mengembangkan

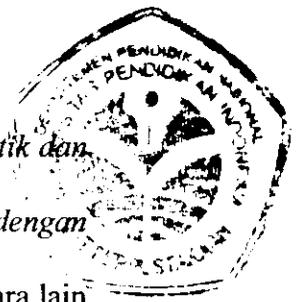


kebudayaan daerah, (b) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan dan perekonomian daerah, (c) Meningkatkan penguasaan bahasa asing untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat), (d) Meningkatkan kemampuan berwirausaha (PUSKUR, 2006: 4).

- d. Kurikulum Muatan Lokal. Yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal dalam penelitian ini adalah program pembelajaran yang materi atau isi, dan media penyampaiannya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik yang mengenyam pendidikan pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten Wakatobi. Lingkup isi atau jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing (Inggris, Mandarin, Arab dan lain-lain), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah (Puskur:2006).

#### **F. Penelitian yang Relevan.**

Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa masih perlunya dilakukan berbagai penelitian terhadap implementasi muatan lokal. Hasil-hasil penelitian tersebut antara lain :



Mulyasa, (1997) dalam penelitiannya dengan judul *"Karakteristik dan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal dalam Kaitannya dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat setempat"*. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa Kurikulum muatan lokal belum dilaksanakan secara optimal, baik perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan belum digunakannya metode yang bervariasi, belum digunakannya secara optimal media dan sumber belajar yang terdapat dimasyarakat, serta belum dilakukannya kerja sama dengan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kurikulum muatan lokal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara tujuan kurikulum dan isi/materi muatan lokal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat setempat, baik yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, perkembangan perekonomian daerah, maupun pengembangan kemampuan masyarakat dalam berwiraswasta. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan secara mendalam terhadap muatan lokal terutama dalam keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Rahayu, (2002) dalam penelitiannya yang berjudul *"Implementasi Kurikulum Muatan Lokal 1994 Program Komputer dalam Upaya Mewujudkan PBM yang Aktif dan Kreatif"*. Dari penelitian di temukan bahwa pelaksanaan pengajaran muatan lokal yang menekankan aktifitas dan kreatifitas belum terdapat kesesuaian dalam proses pelaksanaannya, serta belum mencapai hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian tersebut, Penulis

kemudian merekomendasikan tentang Perlu adanya penelitian lanjutan tentang keterpaduan antara Teori dan Praktek seperti yang dikehendaki oleh Kurikulum Muatan Lokal 1994. selain itu penulis juga merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan mengingat keterbatasan penulis dalam memahami pokok masalah dan ruang lingkup penelitian.

Nasir, (2003) dalam penelitiannya dengan judul "*Kinerja Guru Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal pada SLTP Negeri Kabupaten Majalengka*". Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis kemudian membuat rekomendasi tentang perlunya Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dari Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal bagi setiap sekolah, serta perlunya dibentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan lokal, agar tujuan penerapan kurikulum muatan lokal dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta keinginan pemerintah daerah.

Rumli (2004) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengembangan Kurikulum Muatan lokal Sekolah Dasar di Pemerintahan Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*". Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Kondisi pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada sekolah dasar Kota Tanjung Pinang belum optimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan model kurikulum yang mengacu pada pengembangan model desain kurikulum yang profesional yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang melibatkan semua komponen masyarakat. Hasil dari transformasi kurikulum tersebut dapat memberi perubahan pada siswa sesuai dengan tingkat usianya dan

memenuhi tuntutan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Salah satu rekomendasi peneliti adalah harapan agar ada penelitian lanjutan, dengan alasan permasalahan pengembangan kurikulum muatan lokal selalu dinamis dan kompleks.

